

PENERAPAN KONSEP PAPERLESS OFFICE PADA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Amandin, Bochari rachman, M. Izman Herdiansyah

Magister Manajemen
Universitas Bina Darma

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

Abstrak

Perubahan besar pada dunia administrasi sedang berlangsung yang berlaku secara global. Statistik menyebutkan terdapat kenaikan yang sangat fantastik untuk penggunaan internet dan aplikasi Teknologi informasi dan komputer lainnya. Hal ini mendorong perubahan terhadap pola dan mekanisme kerja termasuk pada administrasi pemerintahan. Penerapan paperless office pada institusi pemerintah tentu saja dipengaruhi oleh berbagai aspek sebut saja; kebijakan, perundang-undangan, tingkat jabatan dan kapabilitas personel, yang kesemua aspek tersebut perlu dikaji dan diteliti sejauhmana mampu mempengaruhi penerapannya dalam aktivitas organisasi pemerintahan dan bagaimana proses dan aktivitas penerapannya berlangsung. Salah satu layanan yang telah akrab dengan konsep ini adalah Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) yang sebagian besar telah mengadopsi kemajuan teknologi dalam aktivitas kerjanya, dapat dilihat sebagai contoh kasus yang perlu diapresiasi mengingat layanan ini mempertemukan pemerintah daerah dengan masyarakat dan stake holder-nya

Kata kunci: *Paperless office, Teknologi Informasi Komunikasi, Jabatan Eselon, institusi pemerintah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik*

1 PENDAHULUAN

Efisiensi dan efektifitas pada organisasi merupakan hal pokok yang sangat penting untuk tetap dijaga dan dicapai, beragam cara para praktisi dan ilmuwan mengembangkan dan memikirkan cara-cara yang paling efektif dalam menjalankan mesin organisasi. Sejalan dengan pemikiran itu juga, kemajuan teknologi juga cenderung mempengaruhi pola berpikir dan tata cara setiap individu dan kelompok dalam menjalankan organisasi.

Dewasa ini peran teknologi terus dikembangkan dalam rangka memudahkan tercapainya tujuan organisasi yang sekaligus juga sebagai jawaban dalam menuju efektifitas dan efisiensi mesin organisasi

2 TINJAUAN PUSTAKA

Paperless ditinjau dari pengertian harfiah bermakna tanpa kertas yang dapat diartikan lebih jauh sebagai suatu usaha operasional administratif yang mengurangi penggunaan kertas di dalamnya. Pengurangan penggunaan kertas semakin mendalam diartikan sebagai suatu usaha perubahan paradigma dimana peran pencatatan, kalkulasi, perekaman secara manual digantikan ke dalam tindakan digital yang lebih akurat, valid dan lebih panjang.

Konsep paperless ini sendiri muncul dari rangkaian implementasi teknologi komputer dan Informatika yang terkini, dimana teknik komputasi dan perhitungan digital mendominasi dalam aktivitas operasional di organisasi modern. Selain itu kemunculan internet sebagai alat komunikasi modern memungkinkan setiap orang terhubung dan berkomunikasi secara cepat dan murah.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian Ini menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada kajian teoritis yang digunakan untuk membahas fenomena dan serangkaian fakta yang di temukan, penelitian kualitatif, lebih mengedepankan penggunaan pendekatan teknik wawancara dan studi literatur yang lebih menonjolkan pemahaman akan teori-teori, pendapat para ahli dan literatur yang kemudian dibahas lebih lanjut ke permasalahan yang ada. Penelitian jenis ini akan mencatat permasalahan yang terjadi sebagai bahan masukan yang akan dibahas lebih lanjut sehingga memerlukan observasi lapangan, wawancara yang dibuat sedemikian rupa sekaligus membentuk time schedule yang tepat guna mendapatkan perumusan masalah yang tepat.

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek adalah semua pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin yang menaungi permasalahan Teknologi Informasi Komunikasi yang dalam hal ini adalah ; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bagian ULP dan LPSE sert Bagian Administrasi Pembangunan.

Sedangkan, sampel diambil dari sebagian populasi yang dilakukan penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dengan memwawancarai beberapa pejabat Pemerintah terkait, untuk kemudian di cross check melalui teori teori strategi pengembangan Sumber daya manusia sehingga terjadi analisa antara keadaan riil dengan keadaan yang seharusnya menurut teori yang dimaksud.

3.2 Lokasi Penelitian

Kabupaten Banyuwasin yang menaungi permasalahan Teknologi Informasi Komunikasi yang dalam hal ini adalah ; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bagian ULP dan LPSE sert Bagian Administrasi Pembangunan.

Sedangkan, sampel diambil dari sebagian populasi yang dilakukan penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dengan memwawancarai beberapa pejabat Pemerintah terkait, untuk kemudian di cross check melalui teori teori strategi pengembangan Sumber daya manusia sehingga terjadi analisa antara keadaan riil dengan keadaan yang seharusnya menurut teori yang dimaksud.

3.3 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Bagian ini merupakan unit kerja yang berada dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Bagian ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia jasa layanan pengadaan barang jasa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Perpres 54 Tahun 2011 yang diperbaharui dengan Perpres 74 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang kerap dikenal dengan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis dan mendeskripsikan hasil temuan dilapangan untuk dapat ditelaah dengan pendapat dan teori yang digunakan sebagai pedoman, peneliti menemukan beragam hasil temuan dibawah ini yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan pedoman defenisi operasional yang ada.

Populasi yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah para pejabat eselon yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pengambilan keputusan di bidang program pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyuasin dan khususnya mengenai Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin atau dengan kata lain adalah tokoh kunci dibalik pengembangan sumber daya manusia.

4.1 Analisa Karakteristik Narasumber

Narasumber yang diwawancarai berasal dari 2 Satuan Kerja Perangkat daerah yang berbeda namun memiliki kesamaan wewenang dalam mengelola layanan pengadaan secara elektronik. Walaupun secara umum disebutkan bahwa layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) ini merupakan tanggung jawab Bagian Unit Layanan Pengadaan namun secara teknis keberlangsungan layanan LPSE ini mengaitkan beberapa unit kerja lainnya dengan pembagian tugas yang berbeda-beda. Sekretaris Daerah adalah aktor kunci dalam pelaksanaan penyediaan layanan LPSE sehingga kebijakan dan perintahny abaik secara lisan maupun lisan merupakan komando yang mesti dilaksanakan dilapangan. Bagian Unit Layanan Pengadaan merupakan unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan dan melaksanakan teknis setiap aktivitas pelelangan barang atau jasa di pemerintah Banyuasin, dimana di struktural bawahnya terdapat berbagai kepala Sub Bagian yang megurusi bidang bidang tertentu. Selanjutnya terdapat nama Bidang Komunikasi dan Informasi yang merupakan bidang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang dalam urusan LPSE berwenang masalah ketersediaan jaringan internet dan penyediaan media komunikasi, informasi dan telematika .

5 KESIMPULAN

1. Ada beberapa dari aspek Paperless Office yang bisa dikategorikan sebagai penerapan yang baik dimana bentuk digitalisasi dari dokumen-dokumen pendukung dari proses pelelangan pada administrasi layanan LPSE telah berjalan sesuai kaidah paperless, berkurangnya penggunaan kertas dan manajemen surat menyurat yang lebih mudah untuk diterapkan adalah salah satu fakta yang terjadi pada bagian ULP.

2. Peningkatan kualitas masih kurang dimana tidak ada penilaian kualitas secara formal yang tercatat menggunakan data statistik, penilaian dilakukan secara langsung oleh atasan dan dilakukan secara informal.
3. Akomodasi kritik dan saran pada layanan LPSE sudah media penyampaian kritik dan saran yang cukup efektif dan berjalan sesuai sebagaimana mestinya hal ini merupakan nilai positif yang juga dibarengi dengan mekanisme standar waktu yang jelas dan efektif sesuai perundang-undangan
4. Aspek aspek Manajemen Sumber Daya Manusia telah terpenuhi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan namun masih perlu perbaikan pada aspek rekrutmen serta analisa kompetensi SDM belum mempertimbangkan angka statistik keseluruhan PNS dan NON PNS masih bersifat normatif dan abstrak. Pada aspek Perencanaan SDM belum ada mekanisme kontrol untuk keseimbangan
5. Aspek Pengembangan SDM beragam bentuk diklat sudah cukup baik, walaupun korelasi antar pelatihan dan diklat kurang signifikan terhadap jenjang karir. Di sisi lain Program pengembangan SDM juga terlihat cukup baik pada aspek penggajian dimana tambahan penghasilan sudah diberlakukan sebagai pemicu motivasi.
6. Riset SDM masih belum masif dilakukan dan kurang mempertimbangkan angka-angka dan penelitian statistik dari keadaan sebelumnya dan terbatas pada hal-hal tertentu.

6 DAFTAR PUSTAKA

1. Garson, G. David., 2005, *The Promise of Digital Government*, USA : North Carolina State University Press,
2. Habibullah, Achmad., 2007, *Kajian dan Pemanfaatan Egovernment*, Jurnal Vol 1, FISIP Univ. Jember
3. Hughes, W. Owen., 2003 *Public management dan Administration*, New York: Palgrave McMillain,
4. Indrajit, ER., 2005, *E-Government, In Action*. Yogyakarta : Andi Offset.
5. Lukman, Juran, Robert & Gryna, 1998, *Marketing Research & Applied Orientation*, New Jersey : Prentice Hall.
6. Lund, H., 2004, *Electronic documents and authorship: who did it?* New Library World, Illinois : University Press.
7. M. Hattingh., 2001, *The features and impact of the paperless office, with specific reference to the City of Johannesburg*, Midrand MLC, Midrand, South Africa : Afrikaans University.
8. Mustafadidjaya, AR., 2003, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Percetakan UI. Osborne, David & Ted Gaebler, 1996, *Terjemahan : Mewirusahaakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.

9. Parasuraman, Zeithaml, V.A.A.A. Berry, L.L, 1995, *Delivering Service Quality : Balancing Customer Perceptions and Expectation*, New York : The Free Press.
10. Robbin, Steven P., 1996, *Perilaku Organisasi-Konsep-Kontroversi-Aplikasi*, Jakarta : Prenhallindo.
11. Sadiman., 2001, *Peranan Pimpinan dalam Motivasi Kerja*, edisi III. Bandung : Ramadhan.